

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Strata Satu (SI) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

JUNAJDI
21413A0013

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(Studi Kasus Pemilihan Gubernur NTB 2018)



Disusun dan diajukan oleh

JUNAIDI

NIM:21413A0013

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Skripsi ini telah di setujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke sidang panitia
ujian skripsi pada:

Mataram, 14 Agustus 2019

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914


Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA
(Studi Kasus Pemilihan Gubernur NTB 2018)



Skripsi atas nama Junaidi telah dipertahankan di depan dosen penguji program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas muhammadiyah mataram. Pada hari/tanggal: Kamis, 15 Agustus 2019

Dosen Penguji,

1. Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

Ketua

(.....)

2. Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Anggota I

(.....)

3. Dedy Iswanto, ST., MM
NIDN. 0818087901

Anggota II

(.....)

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaidi
NIM : 21413A0013
Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pemilihan Gubernur NTB 2018)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini adalah karya saya sendiri dan tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Muhammadiyah Mataram. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Agustus 2019
Yang membuat pernyataan



JUNAIIDI
NIM. 21413A001

MOTO

“Minimalisir yang negative dan memaksimalkan yang positve”



KATA PENGANTAR

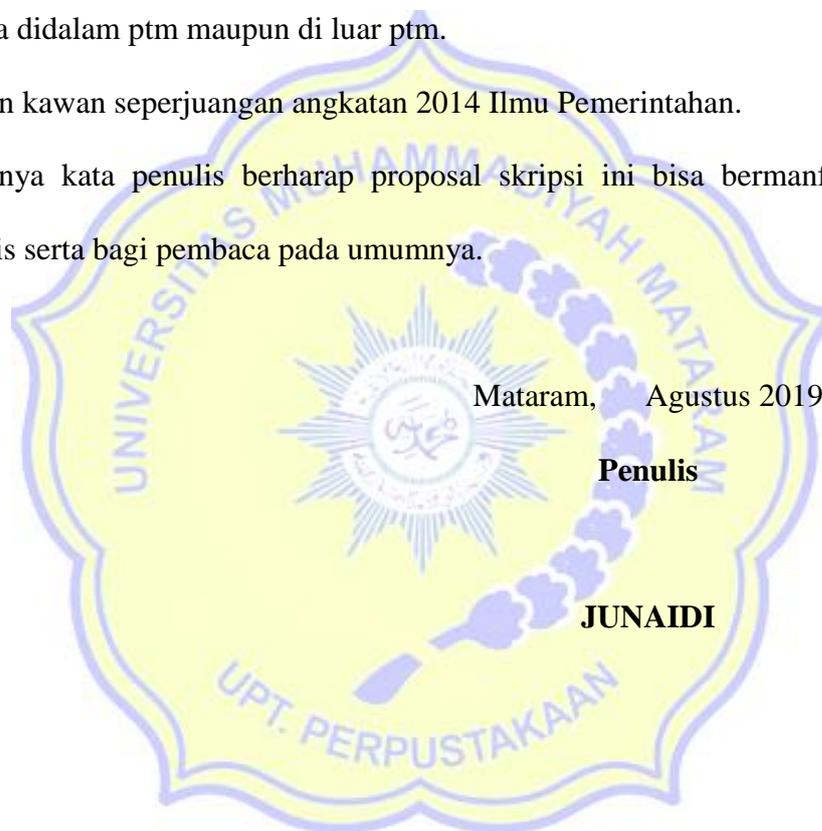
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat,taufikdan hidayanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Provinsi Nusa Tenggara Barat”

Maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Universitas Muhammadiyah Mataram jurusan Ilmu Pemerintahan. Dalm penulisan skripsi ini cukup sering penulis temui berbagi hambatan dan rintangan, tapi berkat pembimbingan, pertolongan, nasihat serta saran dari semua pihak akhirnya pembuatan skripsi ini.

Walaupun begitu, penulis tahu masih banyak terdpat keterbatasan dan kekurangan dalm penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima berbagai saran dan kritik yang membangun agar di masa yang akan datang tulisan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Arsad Gani M.Pd Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Almarhum Dekan Fisipol Drs H. Junaidi., MM
3. Ayatullah Hadi M.IP selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan
4. Drs H. darmansyah M.Si selaku dosen pembimbing 1
5. Yudhi lestanata., S.Ip. M.Ip selaku dosen pemimbing 2
6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan

7. Kepada Ibu dan Ayahku tercinta yang selama ini yang selalu memberi motivasi, mendukung dan mendoakan penulis. Ini bukti cinta dan kasih sayang yang engkau berikan untuk anakmu.
 8. Untuk kaka kaka (kk Ami dank k Fat) dan adik adik ku (Hamdan, fitri, wahyu Ramadan, aji febriansyah, mus muliyadi, rano fahlifi, futri adekayanti.)
 9. Temana Teman saya yang di IMM dari level DPD sampai komisariat yang berada didalam ptm maupun di luar ptm.
 10. Kawan kawan seperjuangan angkatan 2014 Ilmu Pemerintahan.
- Akhirnya kata penulis berharap proposal skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya.



Mataram, Agustus 2019

Penulis

JUNAIDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Demokrasi	5
2.1.1 Definisi Demokrasi.....	5
2.1.2 Prinsip-prinsip Demokrasi.....	8
2.2 Komisi Pemilihan Umum	12
2.2.1 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum.....	14
2.2.2 Strategi.....	15
2.2.3 Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal	22
2.2.4 Teori SWOT	25
2.2.5 Pilkada Akses	28
2.3 Partisipasi Politik	30
2.3.1 Partisipasi Politik.....	30
2.3.2 Bentuk Partisipasi Politik	32
2.3.3 Perilaku Pemilih	34

2.4 Kerangka Teori	42
2.4.1 Strategi	43
2.4.2 Partisipasi pemilih.....	45
2.5 Definisi Konseptual dan Operasional	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian.....	56
3.2 Lokasi Penelitian.....	56
3.3 Tipe Penelitian	56
3.4 Penentuan Inporman	57
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	57
3.6 Jenis Data	60
3.7 Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	63
4.1.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU)	63
4.1.2 Visi Misi KPU PROV. NTB	66
4.1.3 Struktur Organisasi.....	67
4.2 Aspek-aspek Strategi	68
4.2.1 Pengamatan Lingkungan	68
4.2.2 Aspek-aspek Perumusan Strategi	76
4.2.3 Manajemen Efektivitas	76
4.2.4 Ancaman Lingkungan	78
4.2.5 Aspek-aspek Inpelementasi Strategi.....	80
4.3 Prosedur	83
4.4 Evaluasi dan Pengendalian	85
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.....	39
Tabel 4.1	Bentuk Bentuk Agenda Yang Dilakukan Oleh KPU NTB Ketika Pemilihan Kepala Daerah NTB 2017.....	71
Tabel 4.2	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Memilih Kepala Daerah.....	73
Tabel 4.3	Bentuk Bentuk Kegiatan Dalam Memberikan Edokasi Kepda Internal KPU NTB	73
Tabel 4.4	Bentuk bentuk manajemen efektifitas yang di terapkan oleh Komisi Pemilihan Umum NTB dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula	77
Tabel 4.5	Bentuk-bentuk Ancaman Lingkungan	79
Tabel 4.6	Bentuk-bentuk Pengembangan Program	82
Tabel 4.7	Bentuk bentuk prosedur yang di taati oleh KPU NTB	84
Tabel 4.8	Bentuk-bentuk Perbaikan Strategi Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum NTB.	87
Tabel 4.9	Agenda evaluasi yang dilakukan oleh KPU NTB	88
Tabel 4.10	Bentuk-bentuk Pemecahan Masalah Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	53
Gambar 4.1 Struktur organisasi lembaga KPU Prov NTB	67



ABSTRAK

System domekrasi adalah system yang memberikan hak penuh kepada warga Negara untuk berhak memberikan hak suaranya untuk pemimpin yang mereka kehendaki, dalam hal ini komisi pemilihan umum NTB harus menjaman hak suara rakyat guna memastikan berjalanya pemilihan yang juber dan jurdil. Dalam meningkatkan partisipasi pemilihan tentunya dibarangi dengan kapasitas dari komisi pemilihan umum untuk menarik minat dari setiap warga Negara Indonesia, dalam meningkatkan partisipasi pemili pemula tentunya harus ada strategi strategis yang di buat oleh komisi pemilihan umum NTB. Melalui pendekatan persuasive kepada pemilih pemula dan masyarakat pada umumnya adalah salah satu metode dalam memberikan edokasi atau pemahaman terkait dengan politik lebih lebih dalam memilih kepala daerahnya khususnya Gubernur NTB tahun 2018, semakin banyaknya yang sadar akan politik maka indeks domekrasi seamkin baik pula, dengan begitu diharapkan akan melahirkan pemimpin yang berintegritas dan tentunya ini akan menjadikan demokrasi di Indonesia akan semakin baik. Pemberian edukasi plitik kepada pemili pemula wajib diberikan guna menimalisirakan terjadinya apatisme dalam diri pemuda, untuk itu diperlukan strategi khusus di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum NTB dalam menjamin keberlangsungannya domokrasi sehinga terciplah pemimpin yang ideal tentunya ini harus berbanding lurus dengan peran dari masyarakat dalam hal memlih lebih khusus pemilih pemula, karena bagaimanpun pemilih pemula yang akan menuntukan akan nasib daerahnya sendiri.

Kata kunci : Strategi dan Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih

ABSTRACT

Domekrasi system is a system that gives full rights to citizens to have the right to give their voting rights to the leader they want, in this case the NTB general election commission must guarantee the people's voting rights to ensure that elections are jubile and fair. In increasing electoral participation, of course, the capacity of the electoral commission to attract the interest of every Indonesian citizen, in increasing the participation of newbie elections, of course there must be a strategic strategy made by the NTB general election commission. Through a persuasive approach to first-time voters and the general public is one of the methods in providing more political allocation and understanding in choosing regional heads, especially the Governor of NTB in 2018, the more people are aware of politics, the index of seamless domination is good too, so it is expected will give birth to leaders with integrity and of course this will make democracy in Indonesia better. Provision of political education to beginner electorates must be given to minimize the occurrence of apathy in youth, for this reason a special strategy is needed to be carried out by the NTB Election Commission in ensuring the continuity of democracy so that the ideal leader is plotted, of course this must be directly proportional to the role of the community in terms of choosing more especially beginner voters, because after all novice voters who will be destined for their own daer fate.

Keywords: Strategy and General Election, Voter Participation

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan suatu kegiatan demokrasi yang dinanti banyak orang. Terlepas dari tujuan, apakah ingin menjadi calon atau menjadi tim sukses calon yang akan mencalonkan itu. Pemilihan umum ini diharapkan akan menghasilkan para pemimpin atau pengambil kebijakan yang akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk membantu pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahan di daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Awal perubahan besar tersebut terjadi di tahun 2005, dimana pada waktu itu untuk pertama kalinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa ini menunjukkan babak baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) secara langsung diatur dalam UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Pasal 1 ayat (1) dikatakan: "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”. Keputusan untuk memilih sistem pilkada langsung bukan datang secara tiba-tiba, namun ada beberapa faktor yang mendorong percepatan digunakannya sistem langsung tersebut, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan demokrasi.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari kategori pemilu. Pilkada langsung merupakan suatu capaian yang baik dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pilkada langsung berarti mengembalikan hak-hak masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokrasi. Sehingga hal ini semakin memajukan demokrasi di tingkat lokal karena masyarakat lokal akan memilih sendiri siapakah calon pemimpinnya atau yang mewakilinya di daerah.

Pilkada langsung merupakan hasil kerja keras dalam perwujudan demokrasi, walaupun banyak hal yang menjadi konsekuensinya, seperti biaya besarenergi, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Keberhasilan pilkada untuk melahirkan pemimpin daerah yang murni secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada sikap kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Konteks penguatan demokratisasi dalam pilkada secara langsung berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi merupakan langkah awal dalam menuju proses demokrasi yang benar dan substansial.

Kehidupan demokrasiyangsebenarnya, bukan demokrasi prosedural yang selama ini telah dijalankan dalam kehidupan berdemokrasi.

Demokrasi dimaknai sebagai proses yang memiliki implikasi anggaran besar dan tidak bermanfaat, terjadinya konspirasi, pelanggaran dan keamanan yang tidak terjamin, etika politik yang terabaikan, saat inilah cara pandang demikian yang harus dirubah. Hal ini juga memberikan tanda bahwa demokrasi di tingkat local mulai tumbuh, karena dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia digelar perhelatan akbar “Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung”, baik Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Maupun Walikota Dan Wakil Walikota.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi KPU Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih di NTB”?

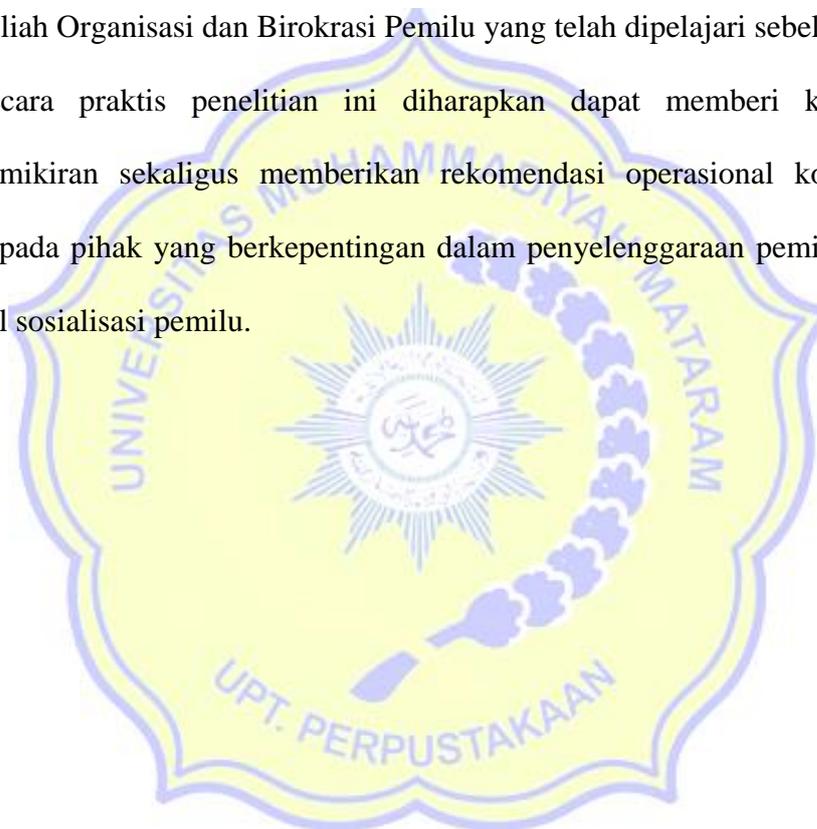
1.7 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksud adalah “Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh KPU NTB dalam meningkatkan partisipasi pemilih di NTB”.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi Magister Ilmu Pemerintahan khususnya Konsentrasi Tata Kelola Pemilu pada mata kuliah Organisasi dan Birokrasi Pemilu yang telah dipelajari sebelumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran sekaligus memberikan rekomendasi operasional konstruktif kepada pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal sosialisasi pemilu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.6 Demokrasi

2.6.1 Definisi Demokrasi

Demokrasi didefinisikan menurut asal kata atau terminologi yaitu “rakyat berkuasa” atau “Government of rule by the people.” Dalam bahasa Yunani Kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata yakni demos yang berarti “rakyat” dan kratos yang berarti “kekuasaan atau berkuasa.”

Mayo dalam Budiarjo (2003:61), memberikan definisi “sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan suasana terjamin kebebasan politik.”

Mahfud MD sebagaimana dikutip dari buku Inu Kencana Syafiie (2002:2), mengajukan gagasan bahwa “Negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.”

Menurut Samuel Huntington sebagaimana dikutip dari buku Moloeng (2000:29) Demokrasi ada jika para pembuat keputusan

kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas 12 bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Demokrasi memiliki banyak arti, namun suatu pengertian yang dapat kita setuju adalah bahwa demokrasi bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang sebenar-benarnya ditangan rakyat. Dimana demokrasi menolak adanya konsentrasi kekuasaan pada suatu kelompok.

Gagasan mengenai demokrasi berawal dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 SM) merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan proses mayoritas. Miriam Budiarjo (2003:53) berpendapat bahwa gagasan demokrasi boleh dikatakan hilang memasuki abad pertengahan (600-1400) yang masyarakat bercirikan masyarakat feodal.

Budiarjo (2003:54) menjelaskan perkembangan demokrasi yang terpenting pada abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215) Magna Charta

merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John 10 dari Inggris. Piagam ini dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Perkembangan lainnya di Eropa Barat, menurut Miriam Budiarjo (2003:54-55), yaitu adanya Renaissance yang merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama dalam abad pertengahan telah disisihkan. Berawal dari hal tersebut timbulah gagasan mengenai adanya kebebasan beragama serta perlu adanya garis pemisah antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya masalah pemerintahan.

Masih menurut Budiarjo (2003:55-56), menjelaskan bahwa penentangan terhadap monarki absolut didasarkan pada mata teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai social contract (kontak sosial). Pada hakekatnya kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolute dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf yang mencetuskan gagasan ini adalah John Locke, bahwa hak-hak politik menurutnya yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak mempunyai milik. Sedangkan Montesque mencoba menyusun suatu system yang dapat menjamin hak-hak politik, yang dikenal dengan nama Trias Politica.

Akibat dari pergolakan tersebut di atas, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan system politik. Demokrasi dalam bentuknya sekarang ini

dimulai sejak munculnya revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi pada tahun 1879. Bertolak dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan tersebut terlihat munculnya ide pemerintahan rakyat atau demokrasi.

2.6.2 Prinsip-prinsip Demokrasi

Guna mencapai prinsip-prinsip demokrasi perlu diadakannya pendidikan demokrasi. Hal ini menjadi sangat mendasar karena kenyataan hidup di dalam demokrasi masih merupakan teori di Indonesia. Kenyataannya baru pada saat sekarang inilah kita berada pada proses demokrasi menuju demokrasi dalam arti sesungguhnya, karena demokrasi bukan demokrasi bukanlah sesuatu yang akan terwujud bagaikan jatuh dari langit, melainkan menyatu dengan pengalaman nyata, usaha dan eksperimentasi kita sehari-hari. Di sinilah persis tempatnya demokrasi memerlukan ideologi yang terbuka yang menolak suatu rumusan ideologi yang sekali untuk selamanya.

Demokrasi harus terbuka terhadap kemungkinan coba dan salah, dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan. Titik kuat demokrasi adalah dengan adanya segala kekurangannya ialah kemampuannya untuk mengoreksi diri sendiri. Inilah keterbukaan demokrasi selalu ada dalam proses menuju demokrasi.

Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang disebutkan oleh para ahli diantaranya adalah prinsip-prinsip demokrasi menurut Bingham Powell sebagaimana dalam buku Roosa John (2008:68) yaitu:

1. Pemerintah mewakili keinginan para warga negara,
2. Dilakukannya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif,
3. Diikuti oleh orang dewasa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih,
4. Pemilihan dilakukan secara bebas, dan yang terakhir
5. Para warga negara memiliki kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan membentuk partai politik.

Prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl sebagaimana dalam buku Abdulkarim (2007: 54) terdapat 6 prinsip dalam demokrasi yaitu :

1. Adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Kabinet dan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa batas, pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislative yaitu DPR dan DPRD. Di Indonesia control tersebut terlihat dari keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusunan peraturan perundangan, dan melakukan uji kepatutan

dan kelayakan untuk pengangkatan pejabat Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur .suatu keputusan tentang apa yang dipilih didasarkan pengetahuan warganegara yang cukup dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
3. Adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi berjalan apabila setiap warga Negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik untuk memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila warga Negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.

5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapat akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapat persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Selain DPR dan juga rakyat dapat juga mencari informasi. Sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan memadai.
6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. Adanya serikat pekerja, terbukanya system politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik.

Selain prinsip-prinsip demokrasi yang dikenal secara universal di Indonesia pun mengenal Prinsip-prinsip demokrasi pancasila dimana Demokrasi pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri.

2.7 Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk

mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu :Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, asas -asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun

2.7.1 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum.

Tujuan Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Fungsi Pemilihan Umum Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD

2.7.2 Strategi

1. Strategi

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang artinya sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Sanjaya, 2008:126). Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2006:5).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

a. Pengertian umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

b. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Menurut Onong Udjana Effendy mengemukakan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan (Effendy, 2004:29) artinya strategi komunikasi mampu menunjukkan bagaimana operasional dilapangan tentang apa yang harus dilakukan. Seperti melakukan strategi di awal dan diakhir untuk dapat mencapai tujuan itu.

Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

Strategi yang baik, memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. KPU Provinsi NTB melakukan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada 2018 melalui pelaksanaan sosialisasi langsung pada masyarakat. Sebab partisipasi masyarakat dalam memilih ini sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan pilkada ditambah lagi masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pendidikan politik ini sehingga dituntut ekstra untuk memberikan pengetahuan dan mensosialisasikan terkait kepemiluan ini.

Salah satu tugas KPU Provinsi NTB adalah jangan sampai ada pemilih yang terhambat haknya untuk berpartisipasi dalam pilkada akibat tidak memahami prosedur tentang bagaimana cara masyarakat atau pemilih untuk berpartisipasi atau tidak golput dalam pemilihan. Walaupun KPU Provinsi NTB sangat menyadari bahwa ada keterbatasan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilihan tersebut, sehingga dukungan dari banyak pihak sangatlah dibutuhkan. Untuk itu strategi begitu penting digunakan dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

2. Bentuk Strategi

Menurut Newman (Pito dkk, 2013:211-212) terdapat empat pilihan strategi, yaitu :

a. Strategi Penguatan.

Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu.

b. Strategi Rasionalisasi.

Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

c. Strategi Bujukan.

Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra lainnya.

d. Strategi Konfrontasi.

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan dan strategi konfrontasi sebagai teori yang cocok digunakan KPU Provinsi NTB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih.

3. Manajemen Strategi

Menurut Nuryadin (2012:27), “Manajemen strategi adalah proses pengarahan usaha perencanaan strategi dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang”. Menurut Jorfi, Yaccob dan Shah (2011), Manajemen strategis merupakan salah satu mata pelajaran yang sedang dibahas dan semakin menarik bidang manajemen pembangunan. Manajemen strategis adalah pendekatan sistematis yang utama dan bertanggung jawab penting dari manajemen umum untuk posisi dan berhubungan organisasi dengan lingkungannya dalam cara yang akan memastikan kesuksesan dan membuatnya aman dari kejutan. Manajemen strategi memegang peran penting dalam organisasi untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif.

Susanto (2014:33) menyatakan bahwa manajemen strategik adalah bagaimana menganalisis suatu kondisi dan arah mana yang harus dituju oleh para perencana strategik (manajer/manajemen) dalam menentukan sasaran sehingga pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Dari pengertian manajemen strategi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses untuk mengarahkan suatu usaha perencanaan strategi dalam mencapai suatu tujuan agar tepat sasaran secara efektif dan efisien.

Makna dari Manajemen strategi yang diterapkan dalam satu organisasi (EddyYunus, 2016:18):

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
- c. Memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- d. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
- e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Penentuan strategi oleh KPU Provinsi NTB melalui proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan (David, 2011:6)

- a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan

tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik; Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar yaitu: Peninjauan ulang faktor-faktor

eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, Pengukuran kinerja, dan 3). Pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan datang.

2.7.3 Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal

1. Pemilih Pemula

Pemilih Pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau baru pertama kali ikut dalam pemilu (Maesur zaky, 2009:14).

Dalam UU No. 7 tahun 2017 pasal 1 ayat (34), syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- a. Umur sudah 17 tahun,
- b. Sudah/pernah kawin,
- c. Purnawirawan/Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian dan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.

Perilaku memilih pemilih pemula umumnya memiliki karakteristik:

- a. Labil.
- b. Baru belajar politik.
- c. Pengetahuan politik yang masih kurang.
- d. Cenderung mengikuti trend atau pengaruh teman.
- e. Suka Menonton TV.

f. Apatis (Ginting, 2013).

2. Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar (Syani.1992:45).

Kualitas partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu masih sangat rendah padahal dari aspek regulasi, sistem pemilu dan data-data tentang pemilih perempuan itu menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan dan peluang. Demokrasi yang sehat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi pemilih salah satu elemen yang terpenting bagi penguatan sistem demokrasi. Partisipasi pemilih bukan saja dilihat pada banyaknya jumlah pemilih namun lebih dari pada dilihat pada aspek kualitas.

Seperti dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diberikan kesempatan bagi perempuan untuk menempati daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD dan dalam daftar calon tersebut pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

3. Kelompok Marjinal

Masyarakat marjinal adalah masyarakat yang identik sebagai masyarakat miskin kota, yang berprofesi sebagai pemulung, pengemis, gelandangan, ataupun buruh pekerja kasar. David Berry

(1995:14) menyatakan bahwa marjinal adalah suatu situasi dimana orang yang bercita-cita atau berkeinginan pindah dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain, akan tetapi ditolak keduanya.

Tidak ada definisi baku tentang siapa kelompok yang terpinggirkan. Lazim diasumsikan bahwa mereka yang tergolong kelompok terpinggirkan (marjinal) adalah mereka yang miskin. Namun, terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu bisa disebut miskin.

Kelompok marjinal adalah elemen atau komunitas masyarakat yang mengalami keterbatasan akses struktural. Baik secara ekonomi maupun politik. Bahkan sering menjadi korban sistem produksi ekonomi. Bahkan posisinya cenderung jauh dari pengaruh langsung pengambilan keputusan strategis. Biasanya mereka ini miskin dan lapis sosial rentan dari segala risiko, pihak yang menjadi dan berpotensi sebagai korban dari proses kebijakan. Kita bisa sebut misalnya komunitas miskin kota (KMK), para buruh tani, buruh pabrik kelas bawah, pedagang kaki lima dengan pendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, dst.

2.7.4 Teori SWOT

Analisis SWOT menurut Rangkuti (1997:18) “Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan

strategi Perusahaan”. Analisis SWOT mempunyai peranan penting dalam kemajuan usaha yang akhir-akhir ini semakin kompetitif persaingannya dalam mencapai tujuan. Arti dari SWOT adalah *Strengths, Weakness, opportunity, Threats*. Yang artinya Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunities*), dan Ancaman (*threats*).

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan pribadi. Dengan demikian suatu perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis tersebut (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman).

Perencanaan strategis harus mampu melihat dan menilai kemungkinan dan ancaman yang terjadi dalam lingkup eksternal dan internalnya sehubungan dengan visi yang dimiliki, tugas dan tujuan akhir mereka. Setelah memiliki visi, dengan memiliki satu komitmen menggapai tujuan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkup yang ada, suatu organisasi harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan alternatif guna menggapai tujuannya dengan memperbandingkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasinya serta peluang dan ancaman dari luar organisasinya. KPU Provinsi NTB dapat juga menggunakan teori SWOT sebagai alat manajemen yang potensial untuk membantu analisis peluang dan ancaman tersebut.

Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar yaitu:

- a. *Strength* (S), adalah karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.
- b. *Weakness* (W), adalah karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.
- c. *Oppurtunity* (O), adalah karakteristik eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampaui sasaran strategiknya.
- d. *Threat* (T), adalah karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapatmencegah organisasi meraih sasaran strategis yang ditetapkan.

Melihat dari ke 4 analisis SWOT diatas maka dapat dihubungkan denganKPU Provinsi NTByaitu :

1. Kekuatan (*Strength*):

- Jumlah Sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kantor.
- Fasilitas penunjang kerja yang memadai seperti: komputer, Mobil, jaringan internet, ruang rapat dll.
- Hubungan komunikasi yang baik antara KPU Provinsi NTB dengan Pemerintah daerah.
- Hubungan komunikasi yang baik antara KPU Provinsi NTB dengan masyarakat/pemilih.

2. Kelemahan (*Weakness*):

- Banyaknya jumlah kecamatan di Provinsi NTB menjadikan KPU harus membentuk tim dengan membagi tim kerja per dapil/rayon agar dapat menjangkau seluruh wilayah.
- Jumlah dana pilkada yang terbatas.
- Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas.
- Kegiatan pemilu yang bersamaan (pileg dan pilpres).
- Masih adanya daerah yang belum terjangkau daerahnya.

b. Peluang (*Opportunity*):

- KPU bersama Dinas kependudukan dan catatan sipil sama-sama mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pilkada melalui program perekaman e-ktp.
- KPU dengan pihak Dinas Pendidikan sama-sama berkontribusi mensosialisasikan pilkada melalui kegiatan KPU *goes to school*.
- KPU dengan pihak dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama mengajak masyarakat agar ikut mensukseskan Pilkada 2018.

c. Ancaman (*Threat*):

- Ingkar janji politik para kontestan pilkada di masa lalu.
- Kampanye hitam dan kampanye negatif menjadi ancaman bagi KPU Provinsi NTB karena akan menimbulkan sifat apatis masyarakat.

2.7.5 Pilkada Akses

Menurut penulis Pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal adalah merupakan bagian dari pilkada akses yang masih sering diabaikan hak politiknya dalam Pemilu. Beberapa tahun yang lalu KPU melakukan kegiatan sosialisasi pemilih dengan membagi menjadi beberapa segmen. Seperti pemilih pemula, perempuan, kaum marjinal, disabilitas tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Meskipun pemilu merupakan momentum yang sangat penting, justru pemilu masih sering memunculkan permasalahan bagi beberapa segmen misalnya: kelompok marjinal. Oleh karena itu pemahaman dari penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu.

Zakiyah (2017:270) mengatakan Jika daerah DKI Jakarta sudah bisa menyelenggarakan pilkada serentak yang ramah bagi penyandang disabilitas, maka daerah lain juga bisa menyelenggarakan hal yang serupa mengingat upaya pemerintah yang juga sudah mulai serius memperhatikan kaum penyandang disabilitas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas terkait dengan hak-hak politik penyandang disabilitas. Dengan demikian sudah tidak ada alasan lagi bagi daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak untuk tidak menjalankan pilkada yang ramah serta bisa diakses untuk semua golongan dan lapisan masyarakat di Indonesia.

Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, diketahui jumlah penyandang disabilitas tidak kecil, menurut badan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas PBB menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Laporan bank dunia menyebutkan jumlah penyandang disabilitas diperkirakan 15% Jumlah penduduk dunia. Indonesia juga mempunyai jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar mengingat banyaknya jumlah penduduknya Indonesia (Zakiyah. 2017:268-269).

Demi terpenuhinya hak-hak politik warga negara, penyelenggara pemilu harus menyediakan semua fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh pemilih dalam memberikan suara. Hal ini baru bisa dilakukan jika daftar pemilih berhasil mencatat jumlah dan jenis pemilih secara akurat. KPU juga harus mengatur agar lokasi TPS mudah diakses oleh pemilih dan tata ruang pemungutan suara disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam memberikan suara. Sebisa mungkin pemilih tidak didampingi dalam memberikan suara karena pendampingan akan mencederai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pilkada secara langsung, memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, agar terciptanya demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Pilkada merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia yang dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan di tingkat lokal atau daerah. Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh

masyarakat dalam pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan.

2.8 Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

2.8.1 Partisipasi Politik

Berikut pendapat-pendapat ahli tentang konsep partisipasi politik.

Pendapat pertama, oleh Kumoroto dalam Efriza (2012:151) menyatakan bahwa: Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*), kedua, partisipasi kelompok (*group participation*), ketiga, kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (*citizen government contacting*) dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung.

Pendapat kedua, oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Budiardjo (2015:368) menyatakan bahwa: Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi

bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Pendapat ketiga, oleh Surbakti (1998:128) menyatakan bahwa : Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik dalam pemilihan umumnya akan lebih baik karena warga negaranya turut dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah yakni dengan jalan memberikan hak pilihnya.

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka penulis berpendapat bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sehingga dengan adanya

kesadaran masyarakat ^{terkait} partisipasi politik ini akan membuat partisipasi memilih masyarakat akan meningkat. Sebab dengan telah terbukanya pola pikir masyarakat akan pentingnya untuk turut aktif dan sangat menentukan untuk kehidupan 5 (lima) tahun ke depan.

2.8.2 Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik dalam pemilu menurut Dedi Irawan dalam Efriza (2012:178), yaitu:

a. Voting (pemberian suara)

Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala waktu atau periodisasi. Pemberian suara pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dll.

b. Kampanye Politik

Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar orang lain atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (misalnya dalam pemilu).

c. Aktivitas Group

Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, teror dan intimidasi, diskusi politik, dll.

d. Kontak Politik

Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol, elit politik, dll.

Selain bentuk partisipasi diatas, ilmuwan politik mengidentifikasi beberapa kecenderungan perilaku politik masyarakat, Michael Rush dan Althoff (1989:131) dalam Efriza (2012:170) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
- b. Sinisme diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
- c. Alienasi sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.
- d. *Anomie* sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awaldengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang

mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

2.8.3 Perilaku Pemilih

1. Perilaku Pemilih

Terkait perilaku pemilih merupakan pelajaran mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

Menurut Firmanzah dalam (Efriza, 2012:480) secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi dan pilihan rasional (Efriza, 2012:492).

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian Sosiolog, Paul F. Lazarsfeld dan rekan sekerjanya

Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Karenanya model ini juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School).

Menurut teori ini, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dsb. Lazearfeld menerapkan cara pikir ini kepada pemilih. Seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih.

Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat (2012), menjelaskan bahwa faktor agama menjadi hal yang dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks pendekatan sosiologis.

b. Pendekatan Psikologis

Selain pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis juga bisa digunakan dalam menganalisa perilaku pemilih dalam pemilihan. Meski begitu pendekatan ini tidak dominan dibanding pendekatan Sosiologis. Dalam bukunya, Dieter Roth (2012) dalam Efriza (2012:menjelaskan bahwa pendekatan sosial psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat.

Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai, Orientasi kandidat dan orientasi isu/utama. Inti dasar pemikiran ini dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai (*party identification*). Dalam pendekatan yang sama, Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat (2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).

c. Pilihan Rasional

Kritik terhadap dua pendekatan di atas, muncul kemudian dengan asumsi pemilih bukan wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari kemauan, teori ini diusung oleh Anthony Downs dalam *Economic Theory of Democracy* (1957) dalam Efriza (2012:514). Artinya, peristiwa-peristiwa politik tertentu dapat mengubah preferensi pilihan seseorang.

Dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan; apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, dan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di sinilah para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional.

Namun terkadang para pemilih rasional yang bisa dikatakan sebagai *free rider* tidak peduli terhadap pemilihan umum, hal ini rasional secara ekonomi. Sebab utamanya adalah usaha yang diperlukan untuk mendapatkan informasi politik tidak sebanding dengan imbalannya (*Anthony Downs: An Economic Theory of Democracy*). Apa arti satu suara dalam pemilihan dengan seratus juta suara. Kemungkinan satu suara tersebut untuk mempengaruhi hasil pemilihan sangatlah kecil.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pemilih menggunakan hak suaranya tanpa harapan yang rasional untuk mengubah hasil. Yang dia dapatkan adalah imbalan emosional, mungkin kebanggaan karena dengan memilih dia menjalankan tugasnya sebagai warga negara atau perasaan bahagia karena sudah berusaha membantu rakyat miskin dengan program yang dipilihnya. Apakah program tersebut terlaksana atau tidak sangat kecil hubungannya dengan suara pemilih tersebut. Resiko (baik atau buruk) yang ditanggung oleh si pemilih atas pilihannya biasanya sangat kecil.

Mencari informasi politik itu mahal dan perlu usaha besar. Karena itu pemilih cenderung tidak melakukannya. Ini adalah apa yang disebut oleh Gordon Tullock (*Public Choice Theory*) sebagai *rational ignorance* (Bryan Caplan; 2007, *The Myth of Rational Voter*). Pemilih sebenarnya tidak selalu rasional dalam menyalurkan suaranya. Mereka tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap berbagai topik (terutama ekonomi) yang sering diusung oleh kandidat. Usaha untuk menambah pemahaman tentang kandidat memerlukan waktu dan juga pemikiran bahkan terkadang biaya.

2. Bentuk Perilaku Pemilih

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik yang disunting oleh Mas'ood dan Mac Andrews (Damsar, 2010:186) membedakan partisipasi atas dua bentuk, yaitu

- a. Partisipasi Politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
* Pemberian suara (voting)	* Pengajuan Petisi
* Diskusi Politik	* Berdemonstrasi
* Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	* Konfrontasi
* Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	* Mogok
	* Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran).
	* Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) perongerilya

Sumber: Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews (1981) dalam Damsar (2010), hal. 186

Sedangkan menurut Eep Saifullah Fatah dalam buku political explorer(Efriza, 2012:487) secara umum pemilih dikategorikan ke dalam empatkelompok utama yaitu:

- a. Pemilih Rasional Kalkulatif, pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.
- b. Pemilih Primordial, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk ke dalam tipe ini biasanya sangat mengagungkan simbol-simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili diperkampungan.
- c. Pemilih pragmatis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa kandidat.
- d. Pemilih emosional, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba, misalnya adalah pilihan yang

emosional. Atau pilihan dengan alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional. Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa atau pemilih pemula.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya. Termasuk ke dalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik. (Surbakti, 1998:15)

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif.

Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti (1998:145) menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

2.4 Kerangka Teori

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:9) proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar yaitu (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, (4) evaluasi dan pengendalian. Pada level korporasi, proses manajemen strategis meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman dan mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor-faktor strategis dan diringkas dengan singkatan S.W.O.T yang berarti *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Threats* (ancaman).

2.4.1 Strategi

Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2006:5).

Menurut Steinberg dalam Pito (2006:196), strategi adalah: Rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah strategi. Sedangkan menurut Reksohadiprodjo (2010:41) strategi adalah: Fondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta pendekatan manajemen mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rencana menyatu, komprehensif dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategis dengan kesempatan dan ancaman yang datang dari luar.

Kotler (1997:75) juga berpendapat bahwa strategi adalah sebagai rencana permainan untuk mencapai sasaran usaha dengan menggunakan pemikiran yang strategis. Sedangkan menurut Robinson dan Pearce (2008:6), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi pesaing untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi mencerminkan pengetahuan perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan dimana perusahaan akan bersaing, dan untuk tujuan apa perusahaan harus bersaing.

Sedangkan menurut Reksohadiprodjo (2010:41) strategi adalah: Pengertian strategi menurut Bryson dalam Kurniawan (2005:82), strategi adalah: Salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta membantu organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Untuk itu dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan

memecahkan masalah dan mengambil keuntungan dari peluang, mengatasi dan kelemahan dan ancaman dari luar.

Sedangkan menurut Firmanzah (2008:244): Strategi merupakan cara, metode atau taktik yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Newman (Pito dkk, 2013:211-212) terdapat empat strategi, yaitu:

1. Strategi Penguatan.

Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu.

2. Strategi Rasionalisasi.

Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

3. Strategi Bujukan.

Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra lainnya.

4. Strategi Konfrontasi.

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan dan strategi konfrontasi sebagai teori yang cocok digunakan KPU Provinsi NTB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Strategi manajemen yang akan dilakukan pada pilkada 2018 diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi NTB dan menunjukkan bahwa KPU Provinsi NTB dapat menyelesaikan pemilihan umum tanpa adanya konflik seperti pada pilkada 2013 lalu dan sebagai bukti telah terjadinya perbaikan manajemen sebagai penyelenggara pemilu.

2.4.2 Partisipasi Pemilih

Kumoroto dalam Efriza (2012:151) menyatakan bahwa: Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*), kedua, partisipasi kelompok (*group participation*), ketiga, kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (*citizen*

government contacting) dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Budiardjo (2015:368) menyatakan bahwa: Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi- pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Ramlan Surbakti (1998:128) menyatakan bahwa : Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.

a. Pemilih Pemula

Undang Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (34) yang berbunyi: “Pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”.

Pada Pemilu 2004, ada 50.054.460 pemilih pemula dari jumlah 147.219.000 jiwa pemilih dalam pemilu. Jumlah itu mencapai 34 persen dari keseluruhan pemilih dalam pemilu. Jumlah tersebut lebih besar dari pada jumlah perolehan suara partai politik terbesar pada waktu itu, yaitu Partai Golkar yang memperoleh suara 24.461.104

(21,62 persen) dari suara sah. Sementara pada Pemilu 2009 lalu, potensi suara pemilih pemula juga sangat luar biasa. Pada Pemilu 2009 kita tahu Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu dengan memperoleh 21 juta suara. Angka itu masih lebih kecil dari jumlah jumlah pemilih pemula yang ada di kisaran 30 jutaan.

Pemilih pemula atau sekarang disebut dengan pemilih milenial sering dikaitkan dengan keberhasilan suatu partai. Sebab jika partai mendapatkan suara pemilih pemula dengan jumlah yang besar maka dapat akan unggul dalam pemilu tersebut. Disini diperlukan kecakapan bagi pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan cerdas. Pemilih pemula sebagai pemegang hak pilih yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, pada umumnya belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kandidat mana yang harus mereka pilih. Pada situasi ini, pemilih pemula selalu menjadi bidikan dan sasaran setiap kandidat untuk meraih dukungannya. Sehingga ada baiknya para pemilih pemula ini dibekali pemahamannya tentang siapa kandidat dan visi misi dari partai tersebut. Ini bertujuan agar para pemilih tidak seperti membeli kucing dalam karung pada saat menyampaikan hak pilihnya.

Istilah pemilih pemula dalam pemilu adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Pilihan politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum demikian halnya dalam pilkada, seperti data yang disebutkan Mahmud MD dalam tulisannya tersebut. Siapa saja yang bisa merebut perhatian pemilih pemula ini akan mendapat keuntungan. Karena dengan perolehan dari suara pemilih pemula ini ditambah dari perolehan suara dari sumber lain akan menambah potensi bisa memenangkan kontestasi pemilu tersebut.

b. Perempuan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan. Ketentuan dalam konvensi PBB tersebut menjelaskan beberapa hal seperti berikut:

- 1) Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
- 2) Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
- 3) Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki.

Muslimat (2016:18-19) ada dua penyebab rendahnya kualitas sumber daya wanita, sebagai berikut: Pertama, faktor internal wanita. Faktor ini ditunjukkan oleh masih rendahnya dan terbatasnya motivasi wanita agar meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Gerak wanita juga terkendala oleh ukuran-ukuran objektif dari sumber daya manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Terbatasnya wawasan, rendahnya keterampilan sebagian wanita dalam berbagai bidang, dan rendahnya derajat kesehatan wanita.

Kedua, faktor eksternal wanita. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemah ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang

kehidupan yang masih bisa gender. Nilai-nilai budaya patrilineal mengakibatkan wanita terdiskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan dan dianggap warga negara yang dua. Hal inilah yang telah mempengaruhi cara wanita mengembangkan konsep diri yang telah menghambat dirinya untuk maju.

Pada masa reformasi ini keterwakilan perempuan dalam politik telah diatur oleh pemerintah. Sejak dahulu perempuan tidak/kurang mendapat perhatian untuk dapat menduduki suatu jabatan atau pekerjaan. Istilah yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya untuk mengurus rumah tangga, tetapi tidak untuk sekarang. Dalam menghadapi era ini perempuan juga harus mempersiapkan diri agar bisa masuk dan mengisi ruang-ruang pekerjaan yang telah dipersiapkan. Seperti dalam peraturan partai politik dalam pengisian kursi calon legislatifnya, dimana partai politik itu harus dapat mengisi calon-calonnya itu dengan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Walaupun dalam pengisian ini masih ada partai politik yang menjadikannya hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan partai saja dan tidak benar-benar ingin menjadi calon. Baik juga dalam lingkungan menteri, sekarang ini pemerintah sudah semakin memperhatikan keterwakilan perempuan untuk dapat duduk dikursi menteri seperti menteri kelautan, menteri kesehatan dan beberapa menteri lainnya. Hal ini patut diapresiasi agar para perempuan dapat

berbenah diri agar bisa ikut terlibat dalam kegiatan berdemokrasi ini. Baik sebagai pelaku politik atau pun sebagai pemilih yang harus turut ambil bagian untuk menyampaikan hak suaranya yang nantinya akan mempengaruhi kehidupannya kedepan.

b. Pemilih Marjinal

Afriyani (2014:19-20) dalam skripsinya menyebutkan dalam kamus sosiologi dan kependudukan istilah marjinal memiliki dua makna, yaitu pertama, suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna. Kedua, kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan rendah. (Hartini dalam Irawati, 2008).

Kelompok marjinal adalah suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna dalam masyarakat. Kelompok marjinal tercipta sebagai imbas dari perubahan struktural di masyarakat yang menghasilkan residu seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Pembangunan yang tidak adil, bias kelas dan geografis, dan sebagainya menjadi sebab lahirnya kelompok marjinal. Keadaan pada kelompok marjinal kemudian membawa dampak pada kesadaran politik yang mereka miliki.

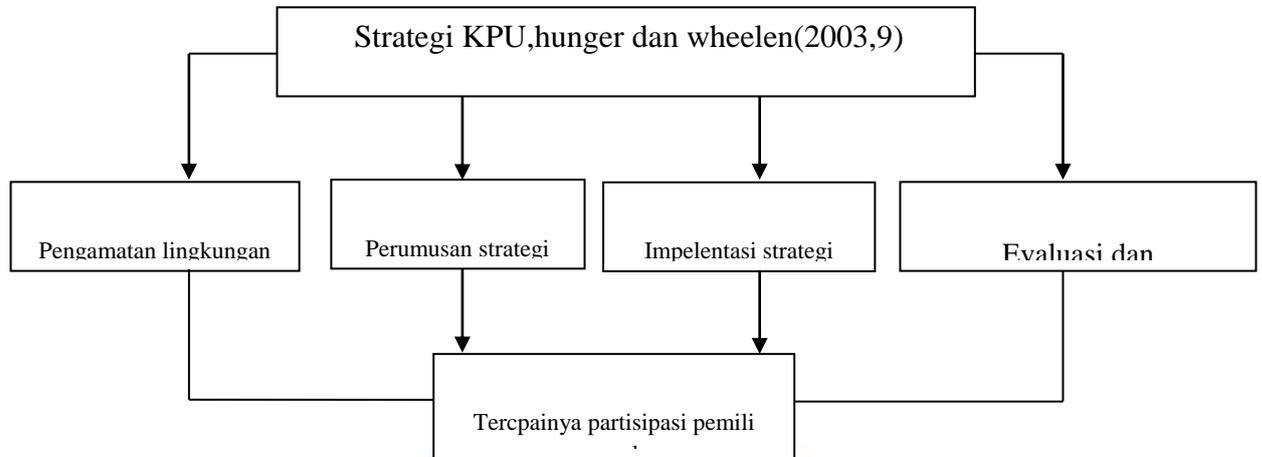
Kelompok tersebut menjadi sasaran pendidikan pemilih karena mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya. Mereka juga memiliki hak untuk paham tentang berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan baik. Jumlah mereka tidak sedikit menjadi faktor lain yang meletakkan pentingnya

kelompok ini sebagai sasaran pendidikan politik. Kelompok ini rentan dimobilisasi dan dikomodifikasi dalam berbagai peristiwa politik. Sehingga pola pikir dari pemilih marjinal ini harus dibuka agar dapat memilih berdasarkan hati nuraninya dan bukan karena adanya iming-iming dari para pelaku politik kotor.

Dalam penelitian ini, teori yang peneliti gunakan menggunakan teori menurut Newman (Pito dkk, 2013:211-212) yaitu meliputi: a. Strategi penguatan, b. Strategi rasionalisasi, c. Strategi bujukan, d. Strategi konfrontasi. Peneliti berpendapat bahwa untuk menganalisa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB dalam meningkatkan partisipasi memilih dengan melihat strategi yang diterapkan pada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih dan kegiatan sosialisasi pemilihan, sehingga dengan pendekatan teori itu peneliti dapat mengambil kesimpulan strategi mana yang dominan dilakukan oleh KPU Provinsi NTB untuk meningkatkan partisipasi memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi NTB tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kerangka teori yang penulis susun pada penelitian ini adalah ingin menjawab tentang strategi yang paling efektif diterapkan oleh KPU Provinsi NTB dalam meningkatkan partisipasi memilih pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi pemilihan dengan menganalisa model strategi berdasarkan teori Newman.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir



2.5 Definisi Konseptual dan Operasional

Difinisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang di jadikan pedoman dalam sehingga akan memudahkan dalam mengomparasikan di lapangan, adapun batas pengertian konseptual pembahasan ini adalah.

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang artinya sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Sanjaya, 2008:126). Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2006:5).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

a. Pengertian umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

b. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Budiardjo (2015:368) menyatakan bahwa: Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

c. Partisipasi pemilih

Kumoroto dalam Efriza (2012:151) menyatakan bahwa: Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), kedua, partisipasi kelompok (group participation), ketiga, kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (citizen government contacting) dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung.

d. Definisi oprasional

Aspek-aspek strategi, hunger dan wheelen(2003,9)

- 1) Pengamatan lingkungan
 - a. Ektsernal
 - b. Internal
- 2) Perumusan strategi
 - a. Manajemen efektifitan
 - b. Ancaman lingkungan
- 3) Implementasi strategi
 - a. Pengembangan program
 - b. Prosedur
- 4) Evaluasi dan pengendalian
 - a. Perbaikan
 - b. Memecahkan masalah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Pengamatan kualitatif cenderung mengandalkan kekuatan indera untuk merefleksikan fenomena budaya.

Seperti yang dikatakan oleh Iatzenhans dan Shultz dalam Marsh dan Stoker, metode kualitatif adalah istilah umum untuk menyebut berbagai teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat sesuai konteks.

3.2 Lokasi Penelitian

Komisi Pemilihan Umum (KPU NTB)

3.3 Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan serta konseptualisasinya maka peneliti ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan” Studi Kasus Pilpres 2019, Tipe penelitian ialah deskriptif, yaitu mencoba membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tertentu.

3.4 Penentuan Informan

3.4.1 Penentuan informan

Pemilihan informan yang akan peneliti wawancarai ialah ketua KPU Dan yang dijadikan informan dari penelitian ini adalah individu-individu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pemilihan informan yang akan peneliti wawancarai pada penelitian ini menggunakan metode dengan cara pemilihan secara *senable*, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan beberapa pertimbangan tertentu.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan Data yang digunakan adalah Metode observasi, Interview, dan dokumentasi.

3.5.1 Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Nurkencana menyatakan bahwa “Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan pilihan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis”. Sedangkan menurut Arikunto, metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan Data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar.

Observasi atau pengamatan dilakukan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan. Dengan metode ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.

Dalam suatu penelitian, observasi merupakan teknik pengumpulan Data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa dan keadaan, khususnya pada saat pengumpulan Data yang dilakukan secara cermat terhadap perilaku subyek dan peristiwa, baik dalam suasana formal dan santai berdasarkan fenomena penampakan yang dilihat, dan terhadap yang didengar.

Metode Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan Data dengan mengamati secara langsung “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan” study kasus, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (KPU NTB)

3.5.2 Metode Interview/wawancara

Metode wawancara sering juga disebut dengan metode interview yang merupakan teknik pengumpulan Data atau fakta yang diperlukan wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung antara peneliti dan sumber Data.

Interview juga disebut quisioner lisan, lebih lanjut memberikan batasan interview para ahli memberikan batasan sebagai berikut, salah

satunya Arikunto mengatakan bahwa interview atau wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara.

Sedangkan Sutrisno Hadi, menyatakan bahwa interview adalah metode pengumpulan Data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kaidah dan tujuan penelitian.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode wawancara/interview adalah teknik pengumpulan Data dengan cara tanya jawab/dialog secara langsung, yang dilakukan antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin menggali informasi secara langsung dan jelas dari informan.

Dalam penelitian ini digunakan tehnik wawancara semistruktural (*semistructur interview*) didalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Metode wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Adapun keterangan yang ingin peneliti peroleh adalah:

1. Hal-hal yang di terapkan dalam setrategi dan mengoptimalkan “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan” STUDI KASUS Pemilihan Gubernur NTB 2018

3.5.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya adalah dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode ini peneliti memiliki barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, foto, diary, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber Data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber Data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

Arikunto menyatakan bahwa “Metode dokumentasi adalah mencari Data mengenai hal-hal atau variabel dalam hal ini dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa catatan buku dan lain-lain.

Metode ini dipergunakan dalam penelitian sebagai upaya untuk memperoleh:

- 1) Data tentang profil KPU NTB
- 2) Data kesuksesan pemilu
- 3) Data-Data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Jenis Data

3.6.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan Data ^{mentah} dan mengolah Data tersebut.

3.6.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dan selain itu dapat juga melihat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh Data yang lebih akurat. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai Data-Data penunjang untuk dapat melengkapi hasil penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh dari beberapa sumber, termasuk BPS (Badan Pusat Statistik).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian kualitatif ,dilakukan pada saat pengumpulan Data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan Data dalam priomde tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh Data yang dianggap kredibel. (Miles dan Huberman)

3.7.1 Data reduction (Reduksi Data)

Mereduksi Data berarti merangkum , memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

3.7.2 Data display (Penyajian Data)

Setelah mereduksi Data selanjutnya mendisplaykan Data atau penyajian Data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian Data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

3.7.3 Concluding drawing (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan ,Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan Data berikutnya. tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan Data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun angka-angka yang muncul dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk dianalisa secara kuantitatif, akan tetapi hanya sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis Data kualitatif demi pencapaian tujuan penelitian.